

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PULAU TERLUAR STRATEGIS NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN MARITIM

Isna Muhsin Abdillah¹, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: .13.791@ipdn.ac.id, zubakhrum@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau terluar yang berperan strategis dalam pertahanan maritim nasional. Namun, pengelolaan pulau ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, ancaman keamanan, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Penelitian ini menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan pulau strategis guna mendukung pertahanan maritim nasional dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan Korps Marinir/TNI AL menjaga keamanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, kolaborasi masih terkendala perbedaan prioritas, komunikasi yang kurang efektif, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Implementasi Collaborative Governance yang efektif memerlukan koordinasi strategis melalui tim gabungan, peningkatan pertemuan koordinasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Penguatan kapasitas keamanan melalui penyediaan peralatan modern dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, serta militer menjadi faktor krusial. Studi ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Korps Marinir/TNI AL dalam Collaborative Governance dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pulau strategis, mendukung pertahanan maritim, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kebijakan poros maritim dunia Indonesia.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Pulau Strategis Nasional, Pertahanan Maritim, Pemerintah Daerah, Korps Marinir/TNI AL*

ABSTRACT

Indonesia, the largest archipelagic country in the world, has more than 17,000 islands, including outer islands that play a strategic role in national maritime defense. However, managing these islands faces challenges such as limited infrastructure, human resources, security threats, and suboptimal coordination between institutions. This study analyzes the application of Collaborative Governance in managing strategic islands to support national maritime defense, using a qualitative descriptive approach and case study method. Data were

obtained through interviews, field observations, and policy document analysis. The findings show that local governments play a role in infrastructure development, while the Marine Corps/Navy ensures security and provides education to the community. However, collaboration is still hindered by differences in priorities, ineffective communication, and limited human and financial resources. Effective implementation of Collaborative Governance requires strategic coordination through joint teams, increased coordination meetings, and community involvement in managing marine resources. Strengthening security capacity through the provision of modern equipment and harmonizing policies between central government, local governments, and the military are crucial factors. This study emphasizes that the synergy between local governments and the Marine Corps/Navy in Collaborative Governance can enhance the effectiveness of managing strategic islands, support maritime defense, and contribute to community welfare and Indonesia's world maritime axis policy.

Keywords: *Collaborative Governance, National Strategic Islands, Maritime Defense, Local Government, Marine Corps/Navy*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya (Sørensen & Torfing, 2021). Di antara pulau-pulau tersebut, terdapat pulau-pulau terluar yang memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara serta mendukung pertahanan maritim nasional (Sønderskov, 2019). Pulau-pulau ini berfungsi sebagai garis depan pertahanan sekaligus simbol eksistensi negara di perbatasan. Namun, pengelolaan pulau terluar strategis sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, ancaman keamanan, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal (Lee & Esteve, 2023).

Dalam konteks pengelolaan pulau terluar strategis, pendekatan

Collaborative Governance menjadi sangat relevan (Brisbois et al., 2019). Collaborative Governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan kolaborasi antara berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta dalam perumusan dan implementasi kebijakan (Unceta et al., 2019). Model ini memungkinkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan pulau-pulau terluar guna mencapai tujuan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Ahn & Baldwin, 2024).

Tantangan dalam pengelolaan pulau terluar strategis nasional mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, kelembagaan, hingga teknis. Dalam aspek hukum, tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi

hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang terpadu (Liu, 2024). Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi masih sering menghadapi kendala dalam hal komunikasi, sinergi program, serta efektivitas implementasi kebijakan. Sementara itu, dari segi teknis, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan pulau-pulau tersebut (Bartz et al., 2021). Implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan pulau terluar strategis dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pertahanan maritim melalui pendekatan yang lebih inklusif dan sinergis (Kern & Smutko, 2021). Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tercipta solusi yang lebih inovatif dalam mengatasi tantangan yang ada (Ulibarri, 2019). Selain itu, kolaborasi yang baik dapat memperkuat pertahanan maritim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pulau terluar, serta memperkuat posisi strategis Indonesia dalam geopolitik kawasan.

Berdasarkan urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan pulau terluar strategis nasional guna mendukung pertahanan maritim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif serta meningkatkan sinergi antar pemangku

kepentingan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia

KAJIAN PUSTAKA

Collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015), keberhasilan kolaborasi bergantung pada tiga elemen utama:

1. Motivasi Bersama (Shared Motivation): Keinginan kolektif untuk bekerja sama berdasarkan rasa saling percaya, rasa tanggung jawab, dan tujuan bersama.
2. Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity): Ketersediaan sumber daya, kompetensi, dan struktur organisasi yang mendukung.
3. Proses Kolaboratif (Deliberative Process): Proses komunikasi yang inklusif, transparan, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks pertahanan maritim, collaborative governance mencakup pembagian peran antara aktor sipil (pemerintah daerah, masyarakat lokal) dan militer (Korps Marinir/TNI AL) untuk memastikan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan berjalan efektif sekaligus mempertahankan kedaulatan nasional.

Model ini relevan untuk Pulau Strategis Nasional karena pulau terluar memerlukan pendekatan lintas sektoral yang tidak hanya menekankan aspek

keamanan, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya

METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pulau Strategis Nasional dipilih sebagai kasus utama karena posisinya yang strategis s

ebagai pulau terluar serta dinamika kolaborasi antara aktor pemerintah daerah dan militer (Korps Marinir/TNI AL) yang cukup kompleks.

2. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer:

- 1) Wawancara mendalam dengan pejabat Pemerintah Daerah, perwira Korps Marinir, dan tokoh masyarakat

- 2) Observasi lapangan terkait kondisi infrastruktur, kegiatan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam di Pulau Strategis Nasional.
- 3) Data Sekunder: Dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan pulau terluar dan juga studi literatur tentang collaborative governance dan pengelolaan wilayah perbatasan. Data dianalisis menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam interaksi dan dinamika kolaborasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan utama yang menjadi kunci dalam pengelolaan Pulau Strategis Nasional. Pemerintah Daerah memegang tanggung jawab utama dalam pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Strategis Nasional. Hal ini

mencakup pengembangan dermaga, listrik, dan fasilitas komunikasi yang esensial untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menghambat percepatan pembangunan. Kendala ini menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan

dasar, sehingga menghambat potensi ekonomi pulau.

Di sisi lain, Korps Marinir/TNI AL memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan wilayah. Dengan lokasi yang strategis dan rentan terhadap ancaman penyelundupan, perikanan ilegal, serta pelanggaran batas wilayah, kehadiran Korps Marinir menjadi vital dalam menjaga kedaulatan. Selain menjalankan fungsi pertahanan, Korps Marinir juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga wilayah dan sumber daya maritim. Meski demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korps Marinir masih terbatas. Hambatan komunikasi dan perbedaan prioritas sering kali mengurangi efektivitas koordinasi di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengelolaan Pulau Strategis Nasional.

Berdasarkan analisis lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi model implementasi collaborative governance yang berhasil, yang terdiri dari beberapa elemen kunci. Pertama, koordinasi strategis yang melibatkan pembentukan tim gabungan antara pemerintah daerah dan Korps Marinir/TNI AL. Tim ini bertugas menyusun rencana kerja terpadu untuk mengintegrasikan berbagai upaya pengelolaan dan pengembangan. Selain itu, peningkatan frekuensi pertemuan koordinasi juga menjadi langkah penting untuk memastikan tujuan yang selaras antara

berbagai pihak. Kedua, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi aspek penting dalam keberhasilan pengelolaan. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sumber daya laut melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, akses modal untuk mendukung usaha kecil berbasis kelautan juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Ketiga, penguatan kapasitas keamanan difokuskan pada penyediaan peralatan modern untuk patroli laut dan penempatan personel tambahan di Pulau Strategis Nasional. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan strategis ini.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Korps Marinir memerlukan regulasi yang jelas. Harmonisasi kebijakan menjadi elemen krusial untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antara pihak-pihak terkait. Selain itu, alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Strategis Nasional. Langkah ini akan membuka peluang pengembangan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital menjadi rekomendasi tambahan yang tidak kalah penting. Pengembangan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau aktivitas di perairan sekitar Pulau

Strategis Nasional dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mendukung promosi potensi ekonomi Pulau Strategis Nasional, seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pulau Strategis Nasional, tetapi juga memberikan gambaran solusi yang berpotensi untuk diimplementasikan. Sebagai pulau terluar yang memiliki nilai strategis tinggi, pengelolaan Pulau Strategis Nasional memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan implementasi collaborative governance yang tepat, diharapkan Pulau Strategis Nasional dapat berkembang menjadi kawasan strategis yang mendukung kebijakan poros maritim dunia. Penjabaran lebih rinci dari setiap temuan dan rekomendasi dijelaskan dalam sub-bagian berikut.

1. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dasar Pulau Strategis Nasional. Dermaga yang memadai, akses listrik yang stabil, dan fasilitas komunikasi yang baik menjadi prioritas dalam mendukung aktivitas masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya

akses transportasi, fasilitas kesehatan, dan sumber air bersih, yang semuanya menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengatasi kendala anggaran yang ada. Investasi dalam infrastruktur dasar tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi lokal.

2. Peran Korps Marinir/TNI AL

Sebagai penjaga kedaulatan wilayah, Korps Marinir/TNI AL memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan Pulau Strategis Nasional. Wilayah ini rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, seperti penyelundupan barang, perikanan ilegal, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Kehadiran Korps Marinir di Pulau Strategis Nasional tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan wilayah. Program edukasi ini mencakup pelatihan terkait keamanan maritim, pengelolaan sumber daya laut, dan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan.

3. Kolaborasi yang Masih Terbatas

4. Meskipun sudah ada upaya

- koordinasi antara pemerintah daerah dan Korps Marinir, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini masih terbatas. Hambatan utama yang dihadapi adalah perbedaan prioritas antara kedua pihak, kurangnya komunikasi yang efektif, dan keterbatasan sumber daya manusia serta finansial. Fragmentasi tanggung jawab ini menyebabkan berbagai upaya pengelolaan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kolaborasi yang lebih baik untuk memastikan sinergi antara pemerintah daerah dan Korps Marinir dalam pengelolaan Pulau Strategis Nasional.
5. Koordinasi Strategis
Dalam konteks collaborative governance, koordinasi strategis menjadi elemen penting dalam pengelolaan Pulau Strategis Nasional. Pembentukan tim gabungan antara pemerintah daerah dan Korps Marinir merupakan langkah awal yang dapat diambil untuk mengintegrasikan berbagai upaya pengelolaan. Tim ini bertugas menyusun rencana kerja terpadu yang mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan keamanan, dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan frekuensi pertemuan koordinasi juga menjadi langkah penting
 6. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Masyarakat lokal memegang peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan Pulau Strategis Nasional. Pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut melalui pelatihan dan pendampingan menjadi salah satu solusi yang ditawarkan penelitian ini. Selain itu, penyediaan akses modal untuk mendukung usaha kecil berbasis kelautan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan yang memadai, masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam pengelolaan Pulau Strategis Nasional dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan bersama.
 7. Penguatan Kapasitas Keamanan
Penguatan kapasitas keamanan menjadi prioritas dalam mengatasi berbagai ancaman di Pulau Strategis Nasional. Penyediaan peralatan modern untuk patroli laut, seperti kapal patroli dan sistem pemantauan berbasis teknologi, merupakan langkah penting yang perlu dilakukan. Selain itu, penempatan personel tambahan di Pulau Strategis Nasional dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan

hukum. Dalam hal ini, kerja sama antara Korps Marinir dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan keamanan yang lebih baik.

8. Harmonisasi Kebijakan

Salah satu rekomendasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi militer (Korps Marinir/TNI AL). Regulasi yang memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antara pihak-pihak terkait dapat mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan. Regulasi ini juga dapat menjadi dasar bagi alokasi anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Strategis Nasional. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap pihak dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih optimal.

9. Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan Pulau Strategis Nasional. Pengembangan sistem informasi geografis (GIS) dapat digunakan untuk memantau aktivitas di perairan sekitar Pulau Strategis Nasional, termasuk mendeteksi aktivitas ilegal seperti

penyelundupan dan perikanan ilegal. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk mempromosikan potensi ekonomi Pulau Strategis Nasional, seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan, kepada pasar global. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pulau Strategis Nasional.

Dengan implementasi langkah-langkah strategis yang telah diuraikan, penelitian ini berharap Pulau Strategis Nasional dapat berkembang menjadi kawasan strategis yang mendukung kebijakan poros maritim dunia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk pengelolaan Pulau Strategis Nasional yang lebih baik di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan Pulau Strategis Nasional, sebuah pulau terluar strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung pembangunan ekonomi maritim. Berdasarkan analisis dan temuan, beberapa poin utama yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pentingnya Peran Pulau Strategis Nasional dalam Kedaulatan dan Ekonomi Maritim**
Pulau Strategis Nasional memiliki nilai strategis yang tinggi, baik secara geografis maupun ekonomis. Sebagai bagian dari wilayah terluar Indonesia, Pulau Strategis Nasional berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya dari ancaman keamanan transnasional seperti penyelundupan, perikanan ilegal, dan pelanggaran batas wilayah. Selain itu, pulau memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi kelautan strategis, termasuk dalam sektor perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan perdagangan maritim. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.
 - a. **Keterbatasan Infrastruktur Dasar:** Pulau masih minim fasilitas penting seperti dermaga, akses listrik, fasilitas komunikasi, dan layanan kesehatan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat setempat dan terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi.
 - b. **Ancaman Keamanan:** Lokasi strategis Pulau Strategis Nasional membuatnya rentan terhadap ancaman transnasional, termasuk penyelundupan barang, perikanan ilegal, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing.
 - c. **Kurangnya Sinergi Antarlembaga:** Fragmentasi tanggung jawab antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan institusi pertahanan menyebabkan pengelolaan Pulau Strategis Nasional sering kali tidak berjalan secara terpadu.
2. **Tantangan Utama dalam Pengelolaan Pulau Strategis Nasional**
Pulau Strategis Nasional menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat pengelolaannya secara optimal:
 - a. **Keterbatasan Infrastruktur Dasar:** Pulau masih minim fasilitas penting seperti dermaga, akses listrik, fasilitas komunikasi, dan layanan kesehatan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat setempat dan terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi.
3. **Model Collaborative Governance sebagai Solusi**
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Pulau Strategis Nasional. Model ini melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, Korps Marinir/TNI AL, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan

- lainnya. Elemen kunci dari model ini meliputi:
- a. Koordinasi Strategis: Pembentukan tim gabungan yang menyusun rencana kerja terpadu dan peningkatan frekuensi pertemuan koordinasi untuk memastikan keselarasan tujuan antarlembaga.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses modal untuk usaha kecil berbasis kelautan.
 - c. Penguatan Kapasitas Keamanan: Penyediaan peralatan modern untuk patroli laut, penempatan personel tambahan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan wilayah.
4. Rekomendasi Kebijakan
- Untuk memastikan keberhasilan pengelolaan Pulau Strategis Nasional,
- diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif dan implementasi yang konsisten. Beberapa rekomendasi yang diusulkan meliputi:
- a. Harmonisasi Kebijakan: Penyusunan regulasi yang memperjelas pembagian peran antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan institusi militer (Korps Marinir/TNI AL) untuk mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas kolaborasi.
 - b. Peningkatan Anggaran: Alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan kapasitas keamanan di Pulau Strategis Nasional.
 - c. Pemanfaatan Teknologi Digital: Pengembangan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau aktivitas di perairan sekitar Pulau

Strategis Nasional
serta mendukung
promosi potensi
ekonominya.

d. Implikasi dan
Harapan

Pengelolaan Pulau Strategis Nasional yang efektif tidak hanya akan mendukung kedaulatan wilayah Indonesia, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Implementasi pendekatan collaborative governance diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan pulau-pulau terluar lainnya di Indonesia. Selain itu, sinergi antarlembaga dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat

menciptakan ekosistem
pengelolaan yang inklusif dan
berkelanjutan.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi modern, Pulau Strategis Nasional memiliki potensi untuk berkembang menjadi kawasan strategis yang mendukung kebijakan poros maritim dunia. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan langkah-langkah implementasi yang konkret dalam pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, M., & Baldwin, E. (2024). Who benefits from collaborative governance? An empirical study from the energy sector. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2044505>
- Bartz, C. R. F., Baggio, D. K., Ávila, L. V., & Turcato, J. C. (2021). Collaborative governance: an international bibliometric study of the last decade. *Public Organization Review*. <https://doi.org/10.1007/s11115-020-00503-3>

- Brisbois, M. C., Morris, M., & de Loë, R. (2019). Augmenting the IAD framework to reveal power in collaborative governance—An illustrative application to resource industry dominated processes. *World Development*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1830055X>
- Kern, M. A., & Smutko, L. S. (2021). Collaborative governance: The role of university centers, institutes, and programs. *Conflict Resolution Quarterly*. <https://doi.org/10.1002/crq.21314>

- Lee, S., & Esteve, M. (2023). What drives the perceived legitimacy of collaborative governance? An experimental study. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2026692>
- Liu, Y. (2024). Public trust and collaborative governance: an instrumental variable approach. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2095003>
- Sønderskov, M. (2019). Do local politicians really want collaborative governance? *International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2017-0271>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Accountable government through collaborative governance? *Administrative Sciences*. <https://www.mdpi.com/2076-3387/11/4/127>
- Ulibarri, N. (2019). Collaborative governance. *Ecology and Society*. <https://www.jstor.org/stable/26796941>
- Unceta, A., Barandiaran, X., & Restrepo, N. (2019). The role of public innovation labs in collaborative governance—the case of the Gipuzkoa lab in the Basque Country, Spain. *Sustainability*. <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/21/6103>